

TATA KELOLA DALAM PANDEMI

Disampaikan dalam Forum Diskusi TII
Jakarta, 16 April 2020

WAWAN SUYATMIKO

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

KONTEKS SITUASI

- ▶ Lebih dari 200 negara mengalami pandemi/wabah global COVID-19, data terakhir ada di 213 negara. Di mana China, Italia dan AS menjadi negara dengan tingkat kedaruratan yang sangat tinggi.
- ▶ Secara global, lebih dari >1,6 Juta jiwa terinfeksi virus dan >106 ribu jiwa diantaranya meninggal. Di Indonesia sendiri tercatat >4.200 jiwa terinfeksi dan >370 jiwa meninggal. (Data per 13 April 2020)
- ▶ Namun tidak bisa disangkal, kondisi wabah ini menimbulkan celah untuk korupsi dan dampaknya merampas hak warga untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan berkeadilan.

KORUPSI SEKTOR KESEHATAN

- ▶ Dalam kondisi normal, WHO mencatat >400 juta orang tidak mempunyai akses kesehatan dan 40% populasi dunia tidak mempunyai proteksi/jaminan sosial.
- ▶ Menurut Kantor UNODC, sekitar 10 – 25% dari semua uang yang dihabiskan untuk pengadaan secara global hilang karena korupsi. Di Uni Eropa, 28% kasus korupsi kesehatan terkait dengan pengadaan peralatan medis.
- ▶ Dalam survei Global Corruption Barometer 2017 dan 2019, Transparency International menemukan angka suap di rumah sakit dan pusat kesehatan sebesar 14% di Afrika dan Timur Tengah. Di Amerika Latin dan Karibia, sebesar 10%. Pada tahun 2017 di Indonesia sebesar 15%.

CATATAN KORUPSI INDONESIA

▶ Korupsi Alkes

Kasus Alkes yang menjerat RAC dan TCW di Banten merugikan Rp94M, korupsi Alkes eks Menkes SFS merugikan Rp6,1M, dan sejumlah kasus alkes di daerah seperti Riau, Lampung, Bengkulu, dsb

▶ Korupsi Bencana

Eks-Bupati Nias Binahati Baeha korupsi dana bantuan bencana tsunami Nias tahun 2006-2008 dengan kerugian negara Rp3,7M dan vonis 5 tahun penjara. Eks-Anggota DPRD Mataram dari Fraksi Golkar Muhir terjerat kasus pemerasan bersumber dari dana proyek senilai Rp4,2M yang dianggarkan di APBDP tahun 2018 untuk penanganan bencana NTB dan Muhir divonis 2 tahun penjara. Korupsi proyek penyediaan air di daerah bencana oleh 8 pejabat KemenPUPR pada Desember 2018 terkait dengan dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Total suap yang diduga para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp5,3M, USD5,000 dan SGD22,100.

RISIKO KORUPSI

- ▶ Transparency International mencatat, korupsi di sektor kesehatan menyebabkan kerugian lebih dari US\$ 500 miliar setiap tahunnya. Dan membunuh sekitar 140.000 anak-anak di dunia.
- ▶ WHO memperkirakan US\$ 7,5 T dihabiskan untuk kesehatan setiap tahun; sekitar US\$ 1.000 per orang rata-rata. Sektor ini mewakili hampir 10% dari PDB global.
- ▶ Korupsi sangat mempengaruhi lima dimensi kinerja sistem kesehatan: keadilan, kualitas, daya tanggap, efisiensi, dan ketahanan (WHO dan Bank Dunia 2017).

INEFESIENSI DAN KORUPSI

- ▶ Menurut British Medical Journal (BMJ), wabah flu babi (H1N1) pada 2009-2010 mengakibatkan pengeluaran global sekitar US\$ 18 M untuk menyetok Tamiflu. Namun, perusahaan farmasi yang berbasis di Swiss, Roche, menyatakan bahwa Tamiflu tidak lebih baik daripada parasetamol dalam mengobati flu babi.
- ▶ Belum adanya vaksin untuk Covid-19, maka perlu melakukan kajian cepat dan mendalam dalam kaitannya dengan pengadaan Kloroquin dan Avigan secara berlebihan, dikarenakan kedua obat tersebut belum teruji dalam mengobati Covid-19 secara uji klinis.
- ▶ Red Cross memperkirakan korupsi wabah Ebola 2014-2016 di Guinea dan Sierra Leone lebih dari US\$ 6 Juta. Laporan menunjukkan bahwa korupsi epidemi Ebola diakibatkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak tepat, pelaporan gaji yang salah sasaran, hingga penyusunan kepada awak medis untuk menerima perawatan medis dan meninggalkan zona karantina.

POTENSI KORUPSI

- ▶ Indonesia mengalokasikan Rp 405 T untuk penanganan Covid-19. Di mana Rp 75 T untuk bidang kesehatan, Rp110 T untuk jaring pengaman sosial, Rp70 T untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR dan Rp150 T dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
- ▶ Pasal 27 Perppu 1/2020 menjadi salah satu bentuk imunitas bagi penyelenggara negara agar terbebas dari kerugian negara dan tuntutan pidana-perdata.
- ▶ Model pengadaan cepat dalam merespon situasi pandemik tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tata kelola pengadaan yang baik, yang sudah diatur dalam SE LKPP 3/2020 dan SE LKPP 4/2020 dan aturan penunjangannya lainnya, seperti Permendari 20/2020, SE BPKP6/2020 dan SE KPK 8/2020.

PEMBELAJARAN

- ▶ Penerapan transparansi data dan informasi

Pemerintah Korsel dan Selandia Baru selalu memperbarui informasi setiap hari melalui website. Bahkan di Korsel saat outbreak memuncak (22 Februari – 7 Maret 2020), update dilakukan dua kali setiap hari. Selain itu juga membuka akses terhadap jumlah tes yang besar.

- ▶ Belajar dari Pengalaman

Penanganan SARS dan MERS membuat Taiwan segera membentuk Pusat Komando Nasional sebagai pusat kendali operasi pencegahan penyebaran Covid-19. Pengembangan penelitian untuk menciptakan vaksin dilakukan oleh AS, UK dan UE. Sebagai contoh, sejak tahun 2002, AS telah menghabiskan hampir US\$700 Juta untuk penelitian tentang sindrom SARS dan MERS. Baru-baru ini, Inggris menjanjikan £20 juta untuk penelitian coronavirus dan UE meningkatkan anggarannya menjadi €47,5 juta.

- ▶ Pelibatan masyarakat secara luas

Secara sosial, penerapan karantina s/d PSBB secara tepat dan terukur. Secara ekonomi, Taiwan membuat asuransi kesehatan gratis dan Korsel bahkan memberikan stimulus bagi perbankan untuk menurunkan bunga pinjaman untuk membantu pengusaha kecil yang terdampak.

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

- ▶ Keterbukaan data dan informasi

Keterbukaan data dan informasi ini berisikan sejumlah data/informasi seputar jumlah kasus, upaya pencegahan, simulasi pencegahan skala besar, pengadaan kebutuhan medis dan non-medis, dsb. Pemerintah harus meningkatkan transparansi data uji klinis sehingga parapihak di sektor kesehatan dapat bekerja secara optimal. Juga tidak kalah pentingnya adalah data & informasi jaring pengaman sosial.

- ▶ Pengadaan yang berintegritas dan bebas korupsi

Pemerintah tetap meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan obat-obatan dan vaksin, mempromosikan kontrak yang terbuka dan transparan, dan berbagi informasi tentang kekurangan obat penting secara tepat waktu. Termasuk mengurangi pengaruh kepentingan swasta yang besar untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi kepentingan publik.

- ▶ Partisipasi dan kesadaran publik

Meskipun dalam kondisi yang serba abnormal, publik tetap perlu memantau dan memberikan masukan terhadap semua kebijakan Pemerintah untuk pencegahan korupsi.

MODALITAS INDONESIA

- ▶ Penanganan wabah dan situasi bencana sebelumnya

Pada kasus flu burung tahun 2006 Pemerintah membentuk komite nasional penganggulangan sebagai pusat koordinasi pengendalian penyakit tersebut. Pada kasus flu babi 2009 hal hampir serupa juga dilakukan oleh pemerintah. Atau saat terjadi bencana Tsunami tahun 2004, Pemerintah sigap membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang terdapat satu unit khusus penanganan korupsi (Satuan Anti Korupsi). Kini terdapat Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19.

- ▶ Regulasi yang linier dengan penanganan bencana/wabah dengan pencegahan korupsi

Terbitnya sejumlah regulasi seperti Perppu, PP, Perpres, Inpres hingga Permen dan juga SE dari LKPP, BPKP, dan KPK yang sejalan dengan upaya optimalisasi penanganan Covid-19 yang juga didukung dengan prinsip-prinsip antikorupsi.

- ▶ Kesadaran dan pelibatan masyarakat

PSBB merupakan salah satu bentuk kepatuhan warga akan bahaya penyebaran Covid-19. Sejumlah OMS membuat sejumlah inisiatif pemantauan kinerja dan tata kelola penanganan pandemic seperti: LaporCovid19, KawalCovid19, dsb

PENTINGNYA TATA KELOLA

▶ Tata Kelola Data dan Informasi

Data dan informasi sangat penting untuk membuat rujukan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Mulai dari datin tentang sector kesehatan s/d sektor sosial.

▶ Tata Kelola Anggaran

Meski dalam situasi abnormal, sejumlah kebijakan yang berbasis pada penganggaran meski mengikuti kaidah efektif, efisien, tepat, dan tentunya bebas dari korupsi.

▶ Tata Kelola Pengadaan

Sejumlah regulasi yang diterbitkan berkaitan dengan PBJ selaras dengan penanganan wabah/bencana non-alam Covid-19 dan prinsip antikorupsi

▶ Tata Kelola Partisipasi

Pemerintah harus senantiasa melibatkan public dalam setiap pengambilan keputusan, sebab memutus rantai penyebaran Covid-19 salah satu kuncinya adalah partisipasi aktif warga, baik dalam bentuk laporan dan masukan yang membangun.

TERIMA KASIH

WAWAN SUYATMIKO

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA, 2020